

Analisis Bantuan BLT dan PKH untuk Kesejahteraan Masyarakat Ditengah Pandemi Covid-19 Ditinjau dari Ekonomi Islam

Wiwit Amal Rini Br Sitepu ¹, Tuti Anggraini ², and Nurul Inayah ³

¹ Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sumatera Utara, rhinisitepu1999@gmail.com

² Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sumatera Utara, tuti.anggraini@uinsu.ac.id

³ Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sumatera Utara, nurulinayah@uinsu.ac.id

ABSTRACT

This research was conducted in Kutarayat Village, Naman Teran District, Karo Regency. This study aims to find out how the Direct Cash Assistance (BLT) and the Family Hope Program (PKH) are for the welfare of the community in the midst of the COVID-19 pandemic. This research is motivated by the Covid-19 Pandemic which has had a major impact on all life activities, including the decline in domestic economic activity, based on field conditions, it is described that around 2.8 million people have lost their jobs, therefore the government has designed various policies to eradicate the problem. through the provision of assistance, two of which are BLT and PKH. This research approach is a qualitative approach using descriptive analysis method. Sources of data used are primary data and secondary data using data collection techniques, observation, interviews and documentation. The conclusion of this study is that BLT and PKH assistance does help the community in meeting their daily needs and for the needs of school children, but the people who receive BLT and PKH funds cannot be said to be prosperous, this is because the benefits received are very small and the poor only receive a small part of these benefits and fulfillment of needs and fulfillment of needs according to the view of Islamic economics, namely al-Shatibi fulfillment of needs is divided into three levels, namely dharuriyat needs (basic and basic), hajiyyat needs (needs as a complement), and tahsiniyyat needs (is perfect) where the implementation of government assistance, namely BLT and PKH, is in accordance with the level of need in the Islamic economy.

Key words: Bantuan Langsung Tunai (BLT), Program Keluarga Harapan (PKH), public welfare, Covid-19, Islamic Economy.

ABSTRAK

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Kutarayat Kecamatan Naman Teran Kabupaten Karo. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Bantuan Tunai Langsung (BLT) dan Program Keluarga Harapan (PKH) untuk kesejahteraan masyarakat ditengah pandemi covid-19. Penelitian ini dilatar belakangi oleh Pandemi Covid-19 yang sangat berdampak besar pada seluruh kegiatan kehidupan tak terkecuali pada anjloknya aktivitas perekonomian domestik, berdasarkan keadaan lapangan digambarkan sekitar 2,8 juta penduduk telah kehilangan pekerjaan, maka dari itu pemerintah telah merancang berbagai kebijakan untuk memberantas masalah tersebut melalui pemberian bantuan dua diantaranya adalah BLT dan PKH. Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode

analisis deskriptif. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder dengan menggunakan teknik pengumpulan data, observasi, wawancara dan dokumentasi. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bantuan BLT dan PKH memang membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dan untuk kebutuhan anak sekolah namun masyarakat yang mendapatkan dana BLT dan PKH ini belum dapat dikatakan sejahtera, hal tersebut disebabkan manfaat yang diterima sangatlah kecil dan masyarakat miskin hanya menerima sebagian kecil dari manfaat tersebut dan pemenuhan kebutuhan dan pemenuhan kebutuhan menurut pandangan ekonomi Islam, yaitu al-Shatibi pemenuhan kebutuhan terbagi menjadi tiga tingkatan yaitu kebutuhan dharuriyat (bersifat pokok dan mendasar), kebutuhan hajiyyat (bersifat kebutuhan sebagai pelengkap), dan kebutuhan tahsiniyyat (bersifat penyempurna) dimana pelaksanaannya bantuan pemerintah yaitu BLT dan PKH sudah sesuai dengan Tingkat kebutuhan dalam ekonomi Islam.

Kata Kunci: Bantuan Langsung Tunai (BLT), Program Keluarga Harapan (PKH), Kesejahteraan Masyarakat, Covid-19, Ekonomi Islam.

1. Pendahuluan

Virus corona pertama kali dilabeli sebagai wabah karena hanya terdapat pada satu wilayah saja yaitu kota Wuhan yang merupakan salah satu kota di Republik Rakyat Tiongkok. Tapi nyatanya hanya dalam kurun waktu yang singkat virus SARS-CoV-2 telah menyebar keseluruh penjuru dunia tak terkecuali di Indonesia. Pandemi Covid-19 sangat berdampak besar pada seluruh kegiatan kehidupan, tidak hanya pada kesehatan, tetapi juga berdampak pada pendidikan, pariwisata, perindustrian, transportasi, dan kondisi sosial ekonomi, baik individu maupun rumah tangga. Hal ini akan berdampak pada anjloknya aktivitas perekonomian domestik, yang tidak menutup kemungkinan akan menurunkan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan data estimasi, keadaan di lapangan digambarkan sekitar 2,8 juta orang telah kehilangan pekerjaan, dan proyeksi yang ada menunjukkan setidaknya 5,2 juta penduduk lainnya akan kehilangan pekerjaan saat pandemi menyebar (Suryahadi, 2020). Meskipun pemerintah belum memiliki angka statistik kemiskinan terbaru, menteri Keuangan Sri Mulyani mengakui pandemi ini telah membalik semua capaian program pengurangan kemiskinan. Hal ini terjadi karena melonjaknya angka pengangguran, PHK dan berhentinya sebagian besar sektor industri. Dengan kondisi goncangan ekonomi akibat pandemi Covid-19, maka kelompok pekerja yang bekerja dengan upah akan menjadi kelompok rentan yang akan menghadapi penurunan daya beli.

Lockdown atau PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) yang menjadi kebijakan pemerintah akan memberikan pengaruh kepada masyarakat. Hal tersebut

dibuktikan dengan menurunnya penghasilan masyarakat dan bahkan banyak yang kehilangan pekerjaan. Maka pemerintah memberikan kepastian bagi masyarakat prasejahtera untuk mendapatkan bantuan sosial supaya tingkat kesejahteraan dan daya beli masyarakat tetap seimbang.

Masalah kesejahteraan sosial tidak bisa ditangani oleh sepihak dan tanpa teroganisir secara jelas kondisi sosial yang dialami masyarakat. Perubahan sosial yang secara dinamis menyebabkan penanganan masalah sosial ini harus direncanakan dengan matang dan berkesinambungan. Karena masalah sosial akan selalu ada dan muncul selama pemerintahan masih berjalan dan kehidupan manusia masih ada. Dalam penelitian ini penulis memiliki objek penelitian pada masyarakat yang berprofesi sebagai petani di Desa Kutarayat. Desa Kutarayat Kecamatan Naman Teran Kabupaten Karo merupakan salah satu desa di Indonesia yang masyarakatnya terkena dampak akibat pandemi covid-19, yang sebagian besar masyarakat di desa ini memiliki pekerjaan petani.

Salah satu bukti yang nyata di Desa Kutarayat adalah bahwa rata-rata masyarakatnya memiliki penghasilan yang tidak tetap, banyak yang memiliki ladang tapi sewa dan kadang ketika panen tidak sesuai maka utang yang didapat. Maka dari itu masyarakat Desa Kutarayat selalu mengharapkan bantuan dalam bentuk apapun, karena dinilai sangat berharga. Apalagi imbas dari erupsi Gunung Sinabung sebelumnya memperburuk keadaan para masyarakat di Desa Kutarayat, ditambah pandemi lagi. Ini sebagai salah satu bukti bahwa Desa Kutarayat menjadi daerah terdampak. Dengan adanya permasalahan terhadap negara, maka pemerintah telah merancang berbagai kebijakan atau program-program untuk memberantas masalah tersebut.

Pemerintah daerah melalui berbagai program pembangunan antara lain melalui strateginya dalam pemberian bantuan sosial. Di Indonesia terutama untuk penanganan prasejahtera di tengah pandemi Covid-19 diantaranya PKH (Program Keluarga Harapan), Program Sembako, BLT (Bantuan Tunai Langsung), BSB (Bantuan Sosial Beras), KIP (Kartu Indonesia Pintar), KIS (Kartu Indonesia Sehat), Bantuan untuk usaha mikro dan kecil, dan sebagainya. Tujuannya untuk pemenuhan kebutuhan dasar setiap warga negara di tengah Pandemi Covid 19.

2. Tinjauan Pustaka

Pandangan ekonomi konvensional atau kapitalisme tentang kebutuhan atau keinginan merupakan segala sesuatu yang diperlukan manusia dalam rangka menyejahterakan hidupnya. Kebutuhan mencerminkan adanya perasaan ketidakpuasan atau kekurangan dalam diri manusia yang ingin dipuaskan. Orang membutuhkan sesuatu karena tanpa sesuatu itu ia merasa ada yang kurang dalam dirinya. Menurut al-Syathibi, rumusan kebutuhan manusia dalam Islam terdiri dari tiga macam, yaitu:

a. *Dharuriyat* (primer)

Dharuriyat (primer) adalah kebutuhan paling utama dan paling penting. Kebutuhan ini harus terpenuhi agar manusia dapat hidup layak. Jika kebutuhan ini tidak terpenuhi hidup manusia akan terancam didunia maupun akhirat. Kebutuhan ini meliputi, *khifdu din* (menjaga agama), *khifdu nafs* (menjaga kehidupan), *khifdu aql* (menjaga akal), *khifdu nasl* (menjaga keturunan), dan *khifdu mal* (menjaga harta). Untuk menjaga kelima unsur tersebut maka syari'at Islam diturunkan. Tujuan yang bersifat *dharuri* adalah tujuan utama untuk pencapaian kehidupan yang abadi bagi manusia Lima kebutuhan *dharuriyat* tersebut harus dapat terpenuhi, apabila salah satu kebutuhan tersebut diabaikan akan terjadi ketimpangan atau mengancam keselamatan umat manusia baik didunia maupun diakhirat kelak. Manusia akan hidup bahagia apabila ke lima unsur tersebut dapat dilaksanakan dengan baik.

b. *Hajiyat* (sekunder)

Kebutuhan *hajiyat* adalah kebutuhan sekunder atau kebutuhan setelah kebutuhan *dharuriyat*. Apabila kebutuhan *hajiyat* tidak terpenuhi tidak akan mengancam keselamatan kehidupan umat manusia, namun manusia tersebut akan mengalami kesulitan dalam melakukan suatu kegiatan. Kebutuhan ini merupakan penguat dari kebutuhan *dharuriyat*. Maksudnya untuk memudahkan kehidupan, menghilangkan kesulitan atau menjadikan pemeliharaan yang lebih baik terhadap lima unsur pokok kehidupan manusia. Apabila kebutuhan tersebut tidak terwujud, tidak akan mengancam keselamatannya, namun akan mengalami kesulitan. Pada dasarnya jenjang *hajiyat* ini merupakan pelengkap yang mengokohkan, menguatkan, dan melindungi jenjang *dharuriyat*. Atau lebih spesifiknya lagi bertujuan untuk memudahkan atau menghilangkan kesulitan

manusia di dunia.

c. *Tahsiniyat* (tersier)

Kebutuhan *tahsiniyah* adalah kebutuhan yang tidak mengancam kelima hal pokok yaitu *khifdu din* (menjaga agama), *khifdu nafs* (menjaga kehidupan), *khifdu'aql* (menjaga akal), *khifdu nasl* (menjaga keturunan), serta *khifdu maal* (menjaga harta) serta tidak menimbulkan kesulitan umat manusia. Kebutuhan ini muncul setelah kebutuhan *dharuriyah* dan kebutuhan *hajiyyat* terpenuhi, kebutuhan ini merupakan kebutuhan pelengkap.

3. Metodologi Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah metode deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif adalah desain penelitian yang disusun dalam rangka memberikan gambaran secara sistematis tentang informasi ilmiah yang berasal dari subyek atau obyek penelitian (Sanusi, 2013). Pendekatan kualitatif adalah suatu pendekatan dalam melakukan penelitian yang berorientasi pada gejala gejala yang bersifat alamiah karena orientasinya demikian, maka sifatnya naturalistik dan mendasar atau bersifat kealamiahannya serta tidak bisa dilakukan di laboratorium melainkan harus terjun kelapangan (Lukas S Musianto, 2002).

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara terhadap beberapa masyarakat berprofesi pedagang yang berada di Desa Kutarayat Kecamatan Naman Teran Kabupaten Karo dan mengumpulkan berbagai informasi yang telah didapat dari informan. Kemudian peneliti melakukan penyajian data dalam bentuk teks naratif yang bertujuan mendapatkan data yang lebih akurat. Tahap terakhir dari penelitian ini adalah penulisan hasil penelitian yang meliputi wawancara, menyajikan data yang akurat sampai diperoleh hasil kesimpulan akhir penelitian.

4. Hasil dan Pembahasan

Bantuan Tunai Langsung (BLT) di Desa Kutarayat dilaksanakan sejak tahun 2020, dimana awal pelaksanaan BLT sudah terbagi ke dalam masing-masing dusun yang ada di Desa Kutarayat yaitu terdiri dari 5 dusun. Di Desa Kutarayat Rumah Tangga Miskin yang menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebanyak 57 kepala keluarga. Pendataan keluarga penerima manfaat BLT Desa Kutarayat adalah Kepala Desa dan BPD, dengan prosedur pendataan keluarga penerima manfaat BLT pada awalnya

masyarakat yang merasa dirinya layak untuk menerima BLT dengan ketentuan yang telah disebutkan di surat edaran, maka mereka para masyarakat dianjurkan untuk melaporkan ke kantor kepala desa dengan melampirkan fotocopy Kartu Keluarga, dan setelah itu maka dilakukan musyawarah oleh kepala desa dengan masyarakat, setelah dilakukan musyawarah lalu diverifikasi kembali oleh pemerintahan desa dan BPD.

Adapun kendala yang dihadapi dalam pendataan penerima BLT adalah disaat pembagian bansos BST serentak dengan pembagian dan BLT yang menyebabkan data penerima BLT dan BNT menjadi double dan pemerintah desa harus mendata 2 kali, karena aturan dari pemerintah masyarakat tidak boleh mendapatkan 2 bantuan sekaligus. Dan mengenai cara pemerintah desa membagikan dana BLT kepada masyarakat ada 2 cara yaitu, yang pertama dengan menggunakan buku rekening dan yang kedua adalah pemerintahan desa langsung memberikan tunai kepada masyarakat tersebut langsung kerumah penerima manfaat, dengan ketentuan lansia (lanjut usia) dan yang sakit parah yang tidak bisa datang ke kota untuk mengambil uangnya. Jumlah uang yang diberikan kepada masyarakat penerima bantuan BLT uang tunai sebesar Rp300.000/Kepala Keluarga perbulan bulan, hal ini disebabkan oleh arahan dari pemerintah pusat yang menetapkan jumlah dana yang diberikan kepada masyarakat karena Dana BLT bersumber dari dana APBD, dan pada tahun 2021 ini pemerintah memberi arahan untuk mengeluarkan APBD sebesar Rp.205.200.000.

Program Keluarga Harapan di Desa Kutarayat dilaksanakan sejak tahun 2017. Namun di tahun 2021 ini jumlah penerima manfaat PKH sebanyak 223 keluarga dari jumlah penduduk keseluruhan adalah 622 kepala keluarga. Program Keluarga Harapan juga dibagi kedalam V dusun yang ada di Desa Kutarayat. Berbeda dengan BLT, PKH memiliki pendamping dan ketua disetiap dusun. Pendamping PKH adalah seseorang yang direkrut dan ditetapkan oleh Kementrian Sosial Republik Indonesia (RI) untuk melaksanakan tugas-tugas pendampingan PKH, dan terkait dengan Surat Keputusan Direktur Jaminan Sosial, Ditjen Perlindungan dan Jaminan Sosial, Kementrian Sosial RI, (UPPKH Pusat, PedomanUmum PKH).

Pendataan PKH tidak melalui kantor kepala desa seperti BLT, tetapi langsung dari pemerintah pusat, dimana para calon penerima PKH langsung diberikan surat undangan untuk menghadiri pertemuan bahwa mereka telah mendapatkan bantuan

PH dari pemerintah. Namun sejak adanya covid-19 para pendamping PKH dan ketua PKH beserta anggota tidak pernah melakukan pertemuan lagi di balai desa karena pemerintah telah melarang untuk membuat kerumunan. Dan jumlah bantuan PKH yang diterima masyarakat juga berbeda-beda tergantung pada tanggungan masing-masing. Di tahun 2021 ini pemerintah mengeluarkan perintah baru untuk menambah uang yang diterima masyarakat yaitu : Uang untuk ibu hamil dan anak balita Rp. 2.000.000,- uang anak sekolah dasar (SD) sebesar Rp. 450.000 menjadi Rp. 750.000, uang anak SMP Rp. 1.000.000 menjadi Rp.1.500.000, uang anak sekolah menengah akhir (SMA) sebesar Rp.1500.000 menjadi Rp.2.000.000, dan bantuan untuk lansia sebesar Rp.2.400.000, setiap pembagian bantuan dilakukan dalam 4 kali keluar, artinya setiap jumlah uang dibagi 4 atau pertiga bulan sekali.

Dengan adanya BLT masyarakat dapat menggunakan dana tersebut untuk kebutuhan sehari-hari, seperti beras, gula, minyak dan lain sebagainya, membeli pestisida untuk penambahan modal. Karena dimasa pandemi covid-19 seperti sekarang ini sangat sulit bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya karena harga sembako cenderung naik. Maka dari itu masyarakat sangat merasa terbantu akan adanya program BLT dari pemerintah ini.

Dengan adanya PKH masyarakat bisa membelikan sepatu baru dan seragam sekolah yang baru bahkan sepeda untuk anak-anaknya, karena dimasa pandemi seperti saat ini sangat sulit untuk mencari uang. Tetapi dengan hadirnya PKH masyarakat penerima manfaat tersebut lebih mudah untuk memenuhi kecukupan sekolah anak-anaknya dan tidak perlu khawatir karena dana PKH ini keluar per tiga bulan sekali. Dan terkadang ada masyarakat menyalurkan sedikit untuk ditabungkan jika dana tersebut ada sisa, supaya ada tabungan untuk masa depan sebagai jaga-jaga agar apabila sewaktu-waktu program PKH ini tiba-tiba diberhentikan masyarakat tidak panik dalam mencari pinjaman kepada orang lain karena sudah ada simpanan.

Namun menurut penelitian pada sebuah negara berpenghasilan rendah yang sedang dalam masa transisi (*a low-middle income country in transition*), bukti bansos dapat mengentaskan kemiskinan dan mengurangi ketimpangan tidaklah cukup (Habibov 2006). Hal tersebut disebabkan manfaat yang diterima sangatlah kecil dan masyarakat miskin hanya menerima sebagian kecil dari manfaat tersebut, secara desain program bansos tidak bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan dan mengurangi ketimpangan, tetapi BLT dan PKH ini hanya diarahkan untuk membantu

kelompok sangat miskin dalam memenuhi kebutuhan pendidikan dan kesehatan dan juga untuk memberikan kemampuan kepada keluarga untuk meningkatkan pengeluaran konsumsi.

Pandangan ekonomi Islam, menurut al-Shatibi pemenuhan kebutuhan terbagi menjadi tiga tingkatan kebutuhan *dharuriyat* (bersifat pokok dan mendasar), kebutuhan *hajiyyat* (bersifat kebutuhan sebagai pelengkap), dan kebutuhan *tahsiniyyat* (bersifat penyempurna) (Isnaini Harahap dan Muhammad Ridwan, 2016). Dimana dalam penelitian keluarga penerima manfaat di Desa Kutarayat dilihat dari ekonomi Islam mereka memanfaatkan dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Program Keluarga Harapan (PKH) pada masa pandemi covid-19 lebih diutamakan untuk kebutuhan *dharuriyat* yaitu kebutuhan yang bersifat pokok dan mendasar seperti untuk memenuhi kebutuhan pokok yang mendasar yaitu al-nafs, yaitu kebutuhan diri dan jiwa. Selain untuk kebutuhan pokok masyarakat atau informan juga untuk memenuhi kebutuhan yang harus dijaga seperti melahirkan anak, dan keturunan yang mereka biayai untuk sekolah anaknya agar akal dan intelektualnya terjaga. Kedua, kebutuhan *hajiyyat* yang bersifat kebutuhan sebagai pelengkap. Beberapa keluarga di desa Kutarayat memanfaatkan dana BLT dan PKH tidak hanya digunakan untuk kebutuhan pokok, sebagian dari mereka yang memiliki lahan/ladang, dana tersebut digunakan sebagai tambahan modal untuk membeli pestisida untuk tanaman mereka dan akan terus berputar uang tersebut dan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Dan yang ketiga, kebutuhan *tahsiniyyat* merupakan kebutuhan yang bersifat memperindah kebutuhan *dharuriyyat* dan *hajiyyat*. Ada keluarga yang menggunakan dana ini untuk kebutuhan *tahsiniyyat* yang mana jika dana yang diberikan pemerintah sisa atau tidak dipergunakan seluruhnya maka keluarga tersebut membeli makanan bergizi, karena dengan mengonsumsi makanan bergizi dapat menyehatkan tubuh dan agar tubuh tidak mudah sakit.

5. Kesimpulan dan Saran

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis peneliti yang dilakukan pada bantuan BLT dan PKH untuk kesejahteraan masyarakat ditengah pandemi covid-19 ditinjau dari ekonomi islam di Desa Kutarayat Kecamatan Naman Teran Kabupaten Karo, maka

dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang diberikan kepada masyarakat dapat membantu dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dimasa pandemi covid-19 dan sebagian masyarakat menggunakan dana BLT untuk tambahan modal di ladang mereka untuk melangsungkan kegiatan usaha mereka kedepannya. Namun masyarakat yang mendapatkan dana BLT ini belum dapat dikatakan sejahtera karena dana yang didapatkan hanya Rp.300.000 yang mana dana tersebut hanya cukup untuk membeli kebutuhan pokok itupun hanya untuk beberapa hari saja dan adapun yang menggunakan untuk tambahan modal usaha hanyalah sebatas penambahan untuk membeli pestisida karena tidak akan cukup jika hanya bergantung dengan menggunakan dana BLT tersebut.
2. Masyarakat yang mendapatkan dana Program Keluarga Harapan (PKH) belum dapat dikatakan sejahtera, hal tersebut disebabkan manfaat yang diterima sangatlah kecil dan masyarakat miskin hanya menerima sebagian kecil dari manfaat tersebut, secara desain program bansos tidak bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan dan mengurangi ketimpangan, tetapi PKH ini hanya diarahkan untuk membantu kelompok sangat miskin dalam memenuhi kebutuhan pendidikan dan kesehatan dan juga untuk memberikan kemampuan kepada keluarga untuk meningkatkan pengeluaran konsumsi.
3. Dalam ekonomi Islam, keluarga penerima manfaat dana BLT dan PKH di desa Kutarayati pada masa pandemi covid-19 dalam memenuhi kebutuhan mereka gunakan untuk: Kebutuhan *dharuriyyat* seperti membeli sembako, melahirkan anak, biaya sekolah dan kesehatan, kebutuhan *hajiyyat* seperti dana digunakan untuk tambahan modal usaha tani yang mana usaha itu untuk pendapatan keluarga; Kebutuhan *tahsiniyyat* seperti membeli makanan yang bergizi.

5.2 Saran

Dari uraian dan kesimpulan di atas, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi keluarga penerima bantuan baik BLT maupun PKH adalah, hendaknya dapat menggunakan bantuan yang diberikan sebagaimana sesuai dengan ketentuan.
2. Bagi pemerintah, dalam penentuan penerima bantuan baik BLT maupun PKH hendaknya menggunakan data yang valid sehingga program yang dilaksanakan

lebih tepat sasaran.

3. Bagi peneliti yang selanjutnya harapannya dapat meneiliti lebih luas tentang Program Bantuan Langsung dan Program Keluarga Harapan agar dapat mengetahui apakah pemberian bantuan BLT dan PKH berpengaruh bagi penurunan angka kemiskinan serta peningkatan kesejahteraan.

Referensi

- Al Arif, Nur Rianto. (2015). *Pengantar Ekonomi Syariah Teori dan Praktek*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- As'ad, Putra, D. I. A., & Arfan. (2021). Being al-wasatiyah agents: The role of azharite organization in the moderation of Indonesian religious constellation. *Journal of Islamic Thought and Civilization*, 11(2), 124–145. <https://doi.org/10.32350/jitc.11.2.07>
- Eliza, Rima. (2019). Pengaruh Program Keluarga Harapan Terhadap Kesejahteraan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.
- Erfly, Carly Fernando Mau. (2020). Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Bagi Masyarakat Miskin Terkena Dampak Covid-19 Di Desa Talaitad Kecamatan Suluun Tareran Kabupaten Minahasa Selatan.
- Harahap, Isnaini dan Muhammad Ridwan. (2016). *The Handbook of Islamic Economics*. Medan : FEBI UIN-SU Press.
- Hardi, E. A. (2021). *MUSLIM YOUTH AND PHILANTHROPIC ACTIVISM The Case of Tangan Recehan and Griya Derma*, 16(1) 15–29. <https://doi.org/10.21274/epis.2021.16.1.15-29>.
- Harwidiensyah. (2011). Dampak Bantuan Langsung Tunai Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Macini Baji Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa, Skripsi UIN Alauddin Makassar.
- Indriantoro, Nur Bambang Supomo. (2002). *Metodologi Penelitian untuk Akuntansi dan Manajemen*. Yogyakarta: BPFE.
- Iqbal, Hasbi. (2008). Implementasi Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai Tahun 2008 di Kabupaten Kudus.
- Musianto, Lukas S. (2002). Perbedaan Pendekatan Kuantitatif dengan Pendekatan Kualitatif dalam Metode Penelitian, dalam Jurnal Manajemen & Kewirausahaan,
- Nengsih, T. A. (2021). Jambi Province Economic Growth using Principal Component Regression in Islamic Economic Perspective. *Kontekstualita: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 36(01). <http://ejournal.lp2m.uinjambi.ac.id/ojp/index.php/Kontekstualita%0A>

- Nengsih, T. A., Bertrand, F., Maumy-Bertrand, M., & Meyer, N. (2019). Determining the number of components in PLS regression on incomplete data set. *Statistical Applications in Genetics and Molecular Biology*, November. <https://doi.org/10.1515/sagmb-2018-0059>.
- Paat, Refendy dan Sofia Pangemanan. (2021). Implementasi Bantuan Langsung Tunai (BLT) dana Desa Tahun 2020 di Desa Tokin Baru.
- Pakpahan, Roida dan Yuni Fitriani. (2020). Analisa Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam Pembelajaran Jarak Jauh Di Tengah Pandemi Virus Corona Covid-19.
- Prichatin, Asti. (2019). Efektifitas Program Keluarga Harapan (PKH) dalam upaya meningkatkan kesejahteraan keluarga, dalam skripsi IAIN Purwokerto.
- Rahmani, Nur Ahmadi Bi. (2016). *Metodologi Penelitian Ekonomi*. Medan: FEBI UIN-SU PRESS Cet.Pertama.
- Rivai, Veithal Andi Buchari. (2013). *Islamic Economics : Ekonomi Bukan Opsi, Tetapi Solusi*. Bandung: Departemen Agama, Syamil Qur'an.
- Rosmanidar, E., Hadi, A. A. Al, & Ahsan, M. (2021). Islamic Banking Performance Measurement: a Conceptual Review of Two Decades. *International Journal of Islamic Banking and Finance Research*, 5(1), 16–33. <https://doi.org/10.46281/ijibfr.v5i1.1056>.
- Rosyidi, Suherman. (2000). *Pengantar Teori Ekonomi Pendekatan kepada Teori Ekonomi Mikro dan Makro*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,
- Ruslan, Abdul Ghofur Noor. (2013). *Konsep Distribusi dalam Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharto, Edi. (2009). *Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Indonesia*. Bandung: Alfabeta, cet 1.
- Suryahadi, et.al. (2020). *Dampak Wabah COVID-19 pada Kemiskinan: Sebuah Estimasi untuk Indonesia*. Jakarta : The SMERU Research Institute.
- Yafiz, Muhammad et.al. (2016). *Pengantar Ilmu Ekonomi Islam* (Medan: FEBI UIN-SU Press.